

Abstrak

Artikel ini menyajikan tentang transformasi wilayah peri urban, studi kasus di Kabupaten Semarang. Tujuan secara umum adalah untuk mengkaji transformasi wilayah peri urban. Kajian ini didasarkan pada hasil analisis data sekunder dari hasil Sensus Penduduk dan Registrasi penduduk Kabupaten Semarang. Analisis data yang digunakan adalah deskriptif dan analisis tabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, jumlah, pertumbuhan, kepadatan, dan lapangan pekerjaan penduduk merupakan faktor yang berkaitan dengan transformasi wilayah peri urban. Selama periode tahun 2005 sampai tahun 2009, beberapa indikator tersebut mengalami perubahan. Penduduk berumur sepuluh tahun lebih bertambah dari 894.048 menjadi 917.745 jiwa, pertumbuhan 0,46 % menjadi 0,77 %, dengan kepadatan 943 menjadi 966 jiwa per kilometer, mata pencaharian penduduk di sektor non-pertanian mengalami peningkatan, dari 48,50 % menjadi 64,50 %. Keadaan ini diikuti dengan luas penggunaan lahan pertanian yang mengalami penurunan walaupun dalam persentase sangat kecil, dari 25,70 % menjadi 25,69 %, tetapi apabila dibiarkan akan berlanjut sesuai dengan berjalannya waktu, dan dimungkinkan akan membawa efek terhadap berbagai faktor dimasa depan, sehingga perlu diantisipasi, bagaimana cara yang harus dilakukan masih memerlukan kajian dengan melibatkan lintas kajian.

Kata kunci: faktor pendorong transformasi wilayah, peri urban

PENDAHULUAN

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi di negara berkembang akan selalu diikuti dengan kebutuhan akan ruang dalam memenuhi berbagai kegiatan penduduk. Perserikatan Bangsa-bangsa memberikan laporan bahwa pada tahun 2009 jumlah penduduk dunia sudah mencapai 6,810 M dan diperkirakan akan mencapai 8,087 M, pada tanggal 30 oktober 2011 baru saja diingatkan dengan kelahiran penduduk dunia yang ke 7 milyar, dan diperkirakan akan mencapai 8,087 M pada tahun 2025 (PBB, 2009). Padahal pada tahun 1900 jumlah penduduk dunia baru mencapai 1,200 M, berarti hanya dalam kurun waktu 109 tahun jumlah penduduk bertambah

5,610 M. Keadaan jumlah penduduk yang semakin banyak terjadi di mana-mana, termasuk di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) (2009) memberikan laporan bahwa jumlah penduduk sudah mencapai 235 juta, padahal pada hasil sensus 1961 jumlah penduduk baru mencapai 90 juta, yang berarti selama kurun waktu 48 tahun atau tidak ada setengah abad jumlah penduduk Indonesia bertambah dua setengah kali lipat.

Jumlah penduduk yang semakin banyak membawa konsekuensi terhadap pertumbuhan penduduk dan kepadatan penduduk serta penggunaan ruang baik untuk keperluan yang bersifat pribadi dan umum serta kegiatan pertanian dan non-pertanian. Tingginya pertumbuhan penduduk dan konsekuensi kebutuhan

akan ruang ditunjukkan dengan semakin cepat terjadinya proses alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian. Wilayah-wilayah perdesaan di koridor antar kota telah mengalami transformasi struktur wilayah (Giyarsih, 2009). McGee (1991) menyebut transformasi tersebut sebagai proses kotadesasi, yaitu perubahan struktur wilayah agraris ke arah struktur non-agraris. Proses transformasi wilayah tersebut tentunya bukan hanya fisik, tetapi juga perubahan sosioekonomik dan budaya penduduk perdesaan yang antara lain menyangkut struktur produksi, mata pencaharian, dan adat-istiadat penduduk.

Terjadinya transformasi secara spasial di daerah peri urban, secara morfologis akan mengubah bentuk pemanfaatan lahan, karena transformasi secara spasial memiliki pengertian berubahnya bentuk penggunaan lahan. Sejalan dengan berjalannya waktu, transformasi spasial di wilayah peri urban diharapkan, tetapi disisi lain juga dikhawatirkan, karena lama-kelamaan akan berkurang ruang terbuka yang tadinya dalam bentuk pertanian menjadi non-pertanian. Di sisi lain, di dalam kerangka pembangunan perdesaan, industrialisasi diperlukan. Industrialisasi perdesaan diharapkan akan membawa manfaat positif bagi penduduk perdesaan walaupun pada sisi lain memunculkan masalah.

Faktor apa saja yang mendorong terjadinya transformasi pada wilayah peri urban, akan menjadi perhatian utama dalam kajian ini, dengan studi kasus di Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu wilayah di pinggiran Kota Semarang. Dengan menggunakan data sekunder hasil sensus penduduk, susenas, dan registrasi penduduk, serta menggunakan analisis tabel, diharapkan dapat memberikan gambaran tentang faktor yang mendorong terjadinya transformasi wilayah peri urban.

TRANSFORMASI WILAYAH PERI URBAN

Transformasi merujuk pada suatu proses pergantian (perbedaan) ciri-ciri tertentu dalam suatu waktu tertentu. Proses ini mengandung tiga unsur penting. Pertama, perbedaan merupakan aspek yang sangat penting dalam proses transformasi karena dengan perbedaannya dapat dilihat perwujudan dari sebuah proses transformasi. Kedua, konsep ciri atau identitas yang merupakan acuan di dalam suatu proses transformasi, baik ciri sosial, ekonomi, atau ciri penampilan sesuatu. Ketiga, proses transformasi selalu bersifat historis yang terikat pada satuan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, transformasi selalu menyangkut perubahan masyarakat dari suatu masyarakat yang lebih sederhana ke masyarakat yang lebih modern dalam satuan waktu yang berbeda (Abdullah, 1994, Giyarsih, 2009).

Transformasi wilayah merupakan representasi dari perkembangan wilayah yang digambarkan sebagai suatu proses perubahan dan pergeseran karakteristik dari komponen wilayah dalam kurun waktu tertentu sebagai akibat dari hubungan timbal balik antarkomponen wilayah tersebut, dengan demikian transformasi wilayah meliputi variabel-variabel yang bersifat multidimensional (Giyarsih, 2009).

Hasil penelitian (Giyarsih, Muta'ali, dan Pramono, 2003) menjelaskan bahwa transformasi wilayah merupakan rentetan yang panjang dan berkaitan satu dengan lainnya. Rentetan peristiwa panjang tersebut mengubah sifat-sifat kedesaan ke sifat kotaan. Tahapan transformasi wilayah berawal dari pusat pedesaan di beberapa titik di koridor jalan yang pada umumnya merupakan simpul penghubung transportasi. Proses ini kemudian bergerak memanjang linier ke sepanjang koridor jalan, sehingga memungkinkan

terjadinya penyatuan perkembangan wilayah perdesaan di sepanjang koridor jalan.

Besly dan Russwurnm (1986, dalam Giyarsih, 2009) mengusulkan empat karakter yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan suatu daerah dapat disebut sebagai periurban atau *urban fringe*, yaitu: sebelumnya merupakan daerah perdesaan dengan dominasi penggunaan lahan untuk pertanian dan komunitas masyarakat perdesaan; merupakan daerah yang menjadi sasaran serbuan perkembangan kota serta menjadi ajang spekulasi tanah bagi para pengembang; merupakan daerah yang diinvasi oleh penduduk perkotaan dengan karakter sosial perkotaan; dan merupakan daerah di mana berbagai konflik muncul, terutama antara penduduk pendatang dengan penduduk asli, antara penduduk kota dengan penduduk desa, serta antara petani dan pengembang.

Subroto dan Setyadi (1997 dalam Giyarsih, 2009) menjelaskan bahwa yang dimaksudkan dengan urban fringe adalah sebagai daerah transisi bukan daerah antara desa dan kota, namun daerah perdesaan yang menyatu dengan daerah perkotaan yang diwarnai oleh disparitas karakter desa dan kota yang kuat baik secara fisik spatial dan sosio kultural. Yunus (2008) menjelaskan bahwa daerah pinggiran kota adalah Daerah pinggiran kota adalah suatu daerah yang juga dikenal sebagai daerah *Urban Fringe* atau daerah Peri Urban atau nama lain yang muncul kemudian merupakan daerah yang memerlukan perhatian yang serius karena begitu pentingnya daerah tersebut terhadap peri kehidupan penduduk baik desa maupun kota di masa yang akan datang. Oleh karena wilayah kota dan desa memiliki dimensi kehidupan yang sedemikian kompleks yang pada umumnya menunjukkan atribut yang berbeda

maka di daerah antara ini kemudian muncul atribut khusus yang merupakan hibrida dari keduanya.

Yunus (2008) juga memberikan penjelasan bahwa WPU ini menentukan peri kehidupan kekotaan karena segala bentuk perkembangan fiscal baru akan terjadi di wilayah ini, sehingga tatanan kekotaan pada masa yang akan datang sangat ditentukan oleh bentuk, proses dan dampak perkembangan yang terjadi di WPU tersebut. Di pihak lain, WPU juga berbatasan langsung dengan perdesaan dan sementara itu di dalamnya masih banyak penduduk desa yang masih menggantungkan kehidupan dan penghidupannya pada sektor pertanian. Konflik antara mempertahankan lahan pertanian untuk kepentingan sektor kedesaan di satu sisi dan melepaskan lahan pertanian di sisi lain untuk kepentingan perkembangan fisik baru sektor kekotaan merupakan bentuk konflik pemanfaatan lahan paling mencolok.

Struktur spatial wilayah WPU menurut Pryor (dalam Yunus, 2008), dapat dibedakan ke dalam 2 kategori, yaitu *urban fringe* di satu sisi dan *rural fringe* di sisi yang lain. WPU disebut *rural-urban fringe*, yang merupakan gabungan dari *rural fringe* dan *urban fringe*. Dengan alasan bahwa kenyataannya WPU merupakan wilayah yang berada di antara wilayah berkenampakan kekotaan seratus persen dan wilayah dengan kenampakan perdesaan seratus persen. Kenampakan wilayah dalam hal ini diartikan sebagai kenampakan fisik lahan (*land scape*) yang diaktualisasikan dalam bentuk pemanfaatan lahan. Bentuk pemanfaatan lahan adalah kenampakan fisik sebagai cerminan kegiatan manusia di atasnya dan hal ini adalah langkah awal dalam mengenali berbagai atribut wilayah yang berasosiasi dengan kenampakan fisik

bentuk pemanfaatan lahan dimaksud seperti karakteristik demografis, kultural, ekonomi dan sosial.

McGee (1991, dalam Giyarsih 2009) menjelaskan bahwa konsep desakota digunakan untuk mengidentifikasi suatu wilayah yang berada di sekitar kota yang ditandai oleh adanya percampuran yang sangat intens mengenai kegiatan pertanian dan non-pertanian. Wilayah yang disebut desakota tersebut terletak antar kota-kota besar yang ada dan membentang sepanjang koridor antar kota-kota besar. Pada awalnya wilayah desakota merupakan wilayah pertanian yang sangat padat penduduknya yang nyaris semuanya berkegiatan di sektor pertanian. Namun demikian perlu dipahami bahwa kegiatan pertanian tidak harus identik dengan kegiatan budidaya sawah. Dengan demikian makin intensnya penjarangan ide-ide baru, inovasi yang berujud nilai-nilai baru dan teknologi mengakibatkan penduduk di wilayah yang semula berkegiatan agraris tersebut mulai menganekaragamkan atau diversifikasi kegiatannya dengan tujuan memperoleh tambahan penghasilan. Peranan kota-kota besar menjadi bertambah signifikan bagi penduduk di wilayah desakota tersebut sejalan dengan makin baiknya prasarana dan sarana transportasi dari dan ke kota. Wilayah desakota merupakan wilayah yang telah mengalami pengaruh yang intensif dari kegiatan non-pertanian, sehingga di dalamnya terlihat percampuran antara kegiatan pertanian maupun non-pertanian. Intensitas percampuran antara kegiatan pertanian dan non-pertanian merupakan fungsi jarak ke kota. Makin dekat jarak sesuatu lokasi ke kota maka makin intens kegiatan kekotaannya/kegiatan non-pertaniannya, dan begitu pula sebaliknya makin jauh dari kota makin intens kegiatan pertaniannya (Yunus, 2008).

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TRANSFORMASI WILAYAH PERI URBAN

Transformasi wilayah yang terjadi di suatu wilayah tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Sargent (1976 dalam Giyarsih, 2009) menjelaskan bahwa telah ada lima kekuatan yang menyebabkan terjadinya pemekaran kota secara fisik, yaitu : peningkatan jumlah penduduk, peningkatan kesejahteraan penduduk, peningkatan pelayanan transportasi, adanya gejala penurunan peranan pusat kota sebagai pusat kegiatan, dan peningkatan peranan para pembangun (*developers*).

Sundaram dan Rao (1984) menyatakan adanya empat faktor yang mempengaruhi perkembangan lahan kekotaan di daerah pinggiran kota, yaitu: adanya jalur transportasi yang memadai, proksimitas dengan pusat kegiatan, preferensi penduduk maupun fungsi-fungsi kekotaan untuk memilih lokasi di kota. Lee (1979) melakukan penelitian tentang proses perubahan pemanfaatan lahan di daerah pinggiran kota telah menentukan enam faktor yang mempengaruhi proses perubahan pemanfaatan lahan di daerah pinggiran kota yaitu : karakteristik fisik dari lahan, peraturan-peraturan mengenai pemanfaatan lahan, karakteristik personal pemilik lahan, banyak sedikitnya utilitas umum, derajat aksesibilitas lahan, dan inisiatif para pembangun. Lebih jauh Yunus (2001) menjelaskan bahwa:

Keberadaan utilitas umum yang memberikan kemudahan bagi aspek-aspek kehidupan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap proses perubahan pemanfaatan lahan. Daerah-daerah yang mempunyai utilitas umum yang lengkap akan lebih mendorong terjadinya proses perubahan pemanfaatan lahan dari

pada daerah yang mempunyai utilitas umum yang sangat terbatas (Yunus, 2001).

Subroto dan Setiyadi (1997 di dalam Giyarsih, 2009), menemukan bahwa struktur pola umum perubahan *spatial urban fringe* ditentukan oleh faktor nilai ekonomi lahan. Hal ini telah menciptakan dua pola spasial yaitu pola perubahan konsentris spasial dan dispersi spasial. Pola perubahan spasial tersebut dipengaruhi oleh akses utama desa-desa di wilayah *urban fringe* ke pusat kota dan jarak desa-desa di wilayah *urban fringe* ke pusat kota induk dan jarak desa-desa di wilayah *urban fringe* ke akses utama kota induk.

Studi yang dilakukan oleh Firman (1992 dalam Giyarsih, 2009) menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun terakhir kota-kota di koridor Jakarta Cirebon Semarang, Jakarta Bandung, Semarang Yogyakarta dan Surabaya Malang telah mengalami perkembangan penduduk perkotaan sebagai bagian tahapan transformasi wilayah yang pesat. Dharmapatni (1993, Firman 1994, dalam Giyarsih, 2009) mengungkapkan bahwa Jabotabek dan metropolis

Bandung telah membentuk koridor yang nyaris bersatu dalam matra ekonomi.

Kabupaten Semarang yang merupakan salah satu wilayah di koridor Semarang Solo dan Semarang Yogyakarta, telah terjadi transformasi wilayah, hal ini dilihat dari faktor perubahan penggunaan lahan dari penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian. Perubahan persentase penggunaan lahan pertanian dan non-pertanian selama tahun 2005 sampai 2009 angkanya sangat kecil. Pada tahun 2005, penggunaan lahan untuk pertanian 25,70 % menjadi 25,69 % pada tahun 2009. Sebaliknya penggunaan lahan untuk kegiatan non-pertanian mengalami penambahan selama periode waktu yang sama, yaitu dari 70,59 % menjadi 70,60 %. Lahan yang dipergunakan untuk pekarangan dan bangunan mengalami peningkatan, yaitu dari 20,73 % menjadi 20,89 %.

Lebih lanjut (Yunus, 2001) juga menjelaskan bahwa kepadatan penduduk merupakan faktor utama yang menyebabkan terjadinya transformasi wilayah peri urban. Semakin tinggi kepadatan penduduk akan semakin tinggi tingkat transformasi wilayahnya.

Tabel. 1. Penggunaan Lahan Pertanian dan non-pertanian di Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2009

No	Tahun	Pertanian (%)	Non Pertanian (%)	PerakanganBangunan (%)
1	2005	25,7038	74,2962	20,736
2	2006	25,7008	74,2992	20,597
3	2007	25,6970	74,2930	20,603
4	2008	25,6940	74,2960	20,732
5	2009	25,6900	74,3100	20,891

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan dan BPS Kabupaten Semarang Tahun 2010

Keadaan kepadatan yang tinggi mendorong penduduk akan berangsur ke arah pinggiran untuk mencari tempat untuk kegiatan. Pada awalnya hanya satu dua penduduk yang melakukan perpindahan ke arah pinggiran, lama kelamaan seiring dengan berjalannya waktu akan diikuti oleh penduduk lainnya, sehingga menyebabkan daerah pinggiran mengalami transformasi.

Berdasarkan pendekatan administrasi, di Kabupaten Semarang selama lima tahun sejak tahun 2005 sampai tahun 2009, terjadi perubahan dalam jumlah penduduk pertumbuhan penduduk, dan kepadatan penduduk. Jumlah penduduk mengalami perubahan positif, yaitu bertambah dari tahun ke tahun, pada tahun 2005 jumlahnya 896.048 jiwa dan bertambah menjadi 917.745 jiwa. Pertambahan jumlah penduduk di Kabupaten Semarang disebabkan oleh faktor alami dan non alami, artinya pertumbuhan penduduk disebabkan oleh adanya kelahiran dan kematian serta adanya pertambahan jumlah orang yang masuk dan keluar dari dan ke Kabupaten Semarang pada periode 2005 sampai 2009. Selisih antara pertumbuhan alami dan migrasi adalah positif, dengan angka pertumbuhan yang semakin bertambah, pada

tahun 2005 adalah 0,46 persen, dan pada tahun 2009 menjadi 0,77 persen (tabel 2). Keadaan ini menunjukkan bahwa penduduk di Kabupaten Semarang selalu bertambah, dan bertambahnya jumlah penduduk merupakan salah satu faktor terjadinya transformasi wilayah (Yunus, 2001).

Kepadatan penduduk secara alamiah sangat erat kaitannya dengan daya dukung lingkungan. Penduduk memerlukan ruang untuk melakukan aktifitasnya. Untuk itu dengan adanya pertambahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun, diperlukan ruang untuk aktifitas penduduk. Di Kabupaten Semarang, selama kurun waktu yang lama dari tahun 1976 sampai dengan tahun 2010, terjadi *spread effect* dari perkembangan Kota Semarang yang merupakan Ibukota Propinsi Jawa Tengah dan menjadi pusat kegiatan Pemerintahan dan industri. Hal ini dibuktikan dengan perkembangan industri dan kegiatan non-pertanian di Kota Semarang memacu laju pertumbuhan penduduk di wilayah sekitarnya, salah satunya adalah di Kabupaten Semarang. Selain itu, sebagian wilayah di Kabupaten Semarang berkurang untuk perluasan wilayah Kota Semarang. Kabupaten Semarang yang pada tahun 1976

Tabel 2. Jumlah, Pertumbuhan, dan Kepadatan Penduduk di Kabupaten Semarang Tahun 2005 – 2009

No	Tahun	Jumlah Penduduk	Pertumbuhan Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	2005	896.048	0,46	943
2	2006	899.276	0,36	946
3	2007	906.112	0,73	954
4	2008	913.022	0,76	961
5	2009	917.745	0,77	966

Sumber: BPS Kabupaten Semarang Tahun 2010

masih memiliki 14 kecamatan yang didalamnya termasuk kecamatan Gunungpati (yang sekarang masuk ke wilayah Kota Semarang) dan Kecamatan Salatiga (yang sekarang menjadi Kota Salatiga) (Tabel 3). Di Kabupaten Semarang sendiri juga terjadi penambahan jumlah wilayah kecamatan, hal ini membuktikan bahwa aksesibilitas kota-kota kecil diperlukan untuk menunjang transformasi wilayah di desa-desa sebagai pusat pemerintahan.

Faktor penentu transformasi wilayah peri urban, selain jumlah, pertumbuhan, dan kepadatan penduduk, juga mata pencaharian penduduk. Yunus (2001) menjelaskan bahwa struktur mata pencaharian pada suatu daerah dapat menggambarkan keadaan umum perekonomiannya, khususnya mengenai kegiatan penduduknya. Oleh karena keberadaan daerah pinggiran kota tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan pusat kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi kekotaan terdekat maka struktur kegiatan penduduk pada daerah pinggiran kotapun akan terkena pengaruhnya dari kota tersebut. Di samping itu, keberadaan daerah pinggiran kota juga tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan daerah kedesaan di bagian luarnya, sehingga kegiatan

penduduk pada daerah pinggiran kota inipun tidak terluput dari pengaruh dari kegiatan sosial, ekonomi dan budaya di daerah kedesaan.

Baiquni dan Muta'ali (1998) menyatakan bahwa faktor-faktor yang mendorong tahapan transformasi wilayah adalah perumbuhan ekonomi yang mendorong perkembangan spatial di pusat kota bahkan meluber melewati batas administrasi kota berkembang di wilayah pinggiran kota; perluasan permukiman di pinggiran kota; pertumbuhan penduduk dan kegiatan kota-kota kecil (kecamatan dan kabupaten) yang berdekatan sehingga menimbulkan perkembangan koridor yang akhirnya bergabung; perkembangan infrastruktur dan jaringan jalan di pinggiran kota yang mendorong pertumbuhan baru di sepanjang akses tersebut sehingga menjadi wilayah perluasan kota.

Khusus pada kegiatan ekonomi, penduduk pinggiran kota sebagian berkegiatan di sektor kekotaan yang secara umum dikenal sebagai kegiatan non-pertanian dan sebagian yang lain berkegiatan di bidang pertanian. Ditinjau dari pengaruh keberadaan daerah kekotaan secara fisik, terlihat bahwa makin dekat kearah kota makin banyak pula penduduk yang bekerja

Tabel 3 Jumlah Kota kecil Kecamatan di Kabupaten Semarang

No	Tahun	Jumlah Kec.	Keterangan
1	1976	14	Termasuk kec. Gunungpati dan kec. Salatiga
2	1980	14	Tidak termasuk Kec. Gunungpati (masuk Kota Semarang)
3	2000	15	Ada 3 tambahan kecamatan
4	2002	17	Ada 2 tambahan kecamatan
5	2006	18	Ada satu tambahan kecamatan
6	2010	19	Sampai sekarang

Sumber: Diolah dari Semarang dalam Angka Tahun 1976, 1980, 2000, 2002, 2006, 2010, Badan Pusat Statistik Kabupaten Semarang

di sektor non-pertanian dan makin sedikit penduduk yang berkegiatan di bidang pertanian. Sebaliknya semakin jauh dari kota makin banyak pula penduduk yang berkegiatan utama di bidang non-pertanian. Namun, konsep *distance decay principle* dalam hal jumlah penduduk yang berkegiatan non-pertanian tidak menunjukkan sebaran yang sama ke segala arah, walaupun secara umum memang diakui adanya gejala tersebut. Hal ini disebabkan adanya pengaruh dari kondisi aksesibilitas sesuatu tempat baik fisik, ekonomi, sehingga preferensi untuk bekerja di bidang non agraris juga terpengaruh karenanya. Aksesibilitas memang berkaitan erat dengan intensitas perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi bentuk pemanfaatan lahan non-pertanian di daerah pinggiran kota. Beberapa sarjana mengatakan bahwa makin tinggi derajat aksesibilitas makin tinggi pula tekanan akan perkembangan bentuk pemanfaatan lahan non-pertanian dan yang tersebut terakhir ini tercermin dalam banyaknya konversi bentukpemanfaatan lahan agraris menjadi bentuk pemanfaatan lahan non-pertanian. Dengan demikian tidak mengherankan apabila pada daerah tertentu

dengan jarak yang lebih jauh dari pusat kota menunjukkan proporsi penduduk yang berkegiatan utama non pertanian lebih besar dari daerah yang lebih dekat letaknya.

Pengaruh transformasi wilayah peri urban terhadap matapencarian penduduk oleh (Yunus, 2001) dikelompokkan menjadi 4 macam kelompok struktur mata pencaharian, yaitu Zobikot/urban fringe, Zobikodes/urral fringe, Zobidekot/rurban fringe, Zobides/rural fringe. Berdasarkan klasifikasi tersebut, di Kabupaten Semarang pada tahun 2005 termasuk kelas Zobidekot/rurban fringe, tetapi mengalami perubahan menjadi kelas Zobikodes/urral fringe pada tahun 2009, hanya selama 5 tahun telah terjadi perubahan kelas. Ini menunjukkan terjadi transformasi wilayah di daerah pinggiran kota yaitu di Kabupaten Semarang.

Pusat – pusat perdesaan jumlahnya relative banyak, terdapat berada di sekitar pusat-pusat perkotaan. Antara pusat perkotaan dengan pusat perdesaan terdapat kesenjangan yang relative besar. Dan diantara

Tabel. 4. Jumlah Penduduk berdasarkan Kegiatan Pertanian dan Non-Pertanian Kabupaten Semarang Tahun 2005 dan 2010

No	Tahun	Lapangan Usaha		Jumlah
		Pertanian (%)	Non-Pertanian (%)	
1	2005	51,50	48,50	100
2	2009	31,50	64,50	100

Sumber: Kabupaten Semarang Dalam Angka Tahun 2010

pusat perdesaan yang maju dengan pusat yang kurang maju terdapat pula kesenjangan. Kesenjangan spasial yang ditimbulkan itu mempunyai dampak negative terhadap pembangunan wilayah/daerah. Desa yang memiliki potensi berkembangnya wilayah yang besar akan berkembang secara cepat sedangkan daerah/desa yang lemah potensi wilayahnya akan lamban perkembangannya (Adisasmita,2006). Kecenderungan ini memperlihatkan bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara tidak optimal bahkan terjadi ketimpangan, yang berarti sasaran pembangunan tidak tercapai. Kebijakan pembangunan spasial bertujuan untuk menekan kesenjangan spasial menjadi sekecil mungkin, yaitu kesenjangan atau disparitas antar daerah perkotaan dan daerah perdesaan, antara desa yang maju dengan desa yang kurang maju, antara daerah yang memiliki aksesibilitas tinggi dengan daerah terpencil atau terisolasi.

Williamson (dalam Adisasmita, 2006) menganggap bahwa pola disparitas suatu wilayah atau Negara sesuai dengan tingkat kemajuan ekonomi wilayah yang berbentuk :U: terbalik, artinya kemajuan ekonomi sampai mencapai titik puncak yang selanjutnya akan terbalik dan turun kembali. Titik balik tersebut disebut "*Polarization Reversal*". Untuk mengurangi disparitas tersebut salah satu factor yang utama adalah penyediaan prasarana jalan dan memperbanyak pusat-pusat pedesaan, sehingga seluruh pelosok dapat dijangkau agar pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dapat ditingkatkan yang berarti pembangunan pedesaan dapat dilaksanakan secara optimal (Adisasmita,2006). Diantara pusat-pusat pedesaan tersebut diantaranya ada yang dapat diarahkan fungsinya sebagai desa pusat pertumbuhan dan Agropolitan.

PENUTUP

Faktor-faktor yang diduga turut memberikan kontribusi mendorong terjadinya transformasi wilayah peri urban adalah jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang disebabkan oleh pertumbuhan penduduk non alami yang tinggi, mata pencaharian penduduk yang didominasi oleh sektor di luar sektor pertanian atau industrialisasi, luas lahan terbangun yang sebagian besar adalah digunakan untuk kegiatan non-pertanian atau sebagian besar wilayah didominasi oleh penggunaan lahan terbangun dan lingkungan binaan lainnya, seperti permukiman, perdagangan, industri, jasa, infrastruktur, dan ketersediaan fasilitas sosial ekonomi dan budaya.

DAFTAR RUJUKAN

- Badan Pusat Statistik (BPS). 1976. Kabupaten Semarang Dalam Angka. BPS Badan Pusat Statistik (BPS). 1980. Kabupaten Semarang Dalam Angka. BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS). 1990. Kabupaten Semarang Dalam Angka. BPS
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2009. *Penduduk Indonesia*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2000. *Sensus Penduduk Indonesia*. BPS.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2010. Kabupaten Semarang Dalam Angka. BPS.
- Baiquni dan Muta'ali. 1998. Depopulasi Perdesaan di Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Douglass, Mike. 1996. Land Use Planning and Management Strategies For A Sustainable greater JABOTABEK. Dalam: *Jurnal*

*Perencanaan Wilayah dan Kota. No. 21.
Tahun VII Mei 1996.*

Giyarsih, Sri Rum. 2009. *TransFormasi Wilayah. Disertasi.* Fakultas Geografi Universitas Gadjah mada Yogyakarta. Tidak dipublikasikan.

Lee, Linda. 1979. *Factors ffecting Land Use Changes at The Rural Urban Frange,in Growth and Change. A Jurnal of Regional Development. Vol. X. October 1979.*

McGee. 1990. "The Future of the Asean City: the emergence of Desakota Region" dalam *Proceeding International Seminar and workhop in the South East Asian City of the Future, Jakarta. January 21-25, 1990.*

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 2009. *World Population Data Sheet.* PBB.

Yunus, Hadi Sabari, 2001. *Perubahan Pemanfaatan Lahan Di Daerah Pinggiran Kota. Kasus di Pinggiran Kota Yogyakarta. Disertasi. Fakultas Geografi UGM. Tidak dipublikasikan. Yogyakarta.*

Yunus, 2008. *Dinamika Peri Urban. Determinan masa Depan Kota.* Pustaka Pelaajr, Yogyakarta.